ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PELATIHAN STAF DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh

FRAN OKTARA FAUZI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2021

ABSTRACT

IDENTIFYING THEEFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SYSTEMS, EMPLOYEE TRAINING AND GOVERNMENT'S APPLICATION OF ACCOUNTING STANDARDS FOR THE QUALITY OF THE FINANCIAL REPORTS

By
Fran Oktara Fauzi

The study aims to answer the formulation of the problemthe human resource competence, internal control systems, employee training and government's application of accounting standardsfor the quality of the financial reports of the East Lampung Regency. For the four factors investigated as independent variables, independent variables and dependent variable for the quality of financial reports.

The sampling method used is obtained 80 respondents in the research which is analyzed using SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 26 software. Primary data use questionnaires to construct respondents' perspectives on variables. The hypothesis is later demonstrated by performing validity and reliabilityalso multiple linear regression tests.

The result of multiple linear regression test gift a state that all independent variables(human resource competence, internal control systems, staff training and application of government accounting standards) all have a positive effect on the quality of financial reports. However, for all variables associated with the dependent variable, the application of government accounting standards is most dominant to affect the quality of financial reports.

Keywords: human resource competence, internal control systems, employee training, government's application of accounting standards, multiple linear regression, quality of financial reports

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PELATIHAN STAF DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Oleh

Fran Oktara Fauzi

Penelitian memiliki tujuan untuk menjawab yang menjadi rumusan masalah guna mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistempengendalian intern, pelatihan staf dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadapkualitas laporan keuangan wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Adapun empat faktor yang diteliti sebagai variabel independent dankualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*dan diperoleh 80 responden dalam penelitian yang di analisis menggunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Sevice Solution)* versi 26. Data primer yang digunakan berupa perspektif para responden terhadap variabeldengan menggunakan kuesioner. Hipotesis di canangkan kemudian di buktikan dengan melakukanujivaliditas dan reliabilitas serta regresi linier berganda.

Hasil uji regresi linier berganda menyatakan bahwa semua variabel bebas (kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian intern, pelatihan staf, dan penerapan standar akuntansi pemerintah) berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Namun dari semua variabel yang di kaitkan terhadap variabel terikat, penerapan standar akuntansi pemerintah yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: kompetensisumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pelatihan staf, penerapan standar akuntansi pemerintah, regresi linier berganda, kualitas laporan keuangan

ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PELATIHAN STAF DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

FRAN OKTARA FAUZI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PELATIHAN STAF DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : ***Fran Oktara Fauzi***

Nomor Pokok Mahasiswa : **1411031052**

Jurusan : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.	**Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**
NIP 19761023 200212 1 002	NIP 19870110 201404 2 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19700817 199703 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**

Sekretaris : **Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

Penguji : **Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juni 2021**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir dengan berjudul " Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pelatihan Staf Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Lampung Timur) " adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2021
Penulis

Oktara Fauzi
Npm.1411031052

Scanned with CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Metro, 09 Oktober 1996. Penulis merupakan anak bungsu dari empat orang saudara dari pasangan Alm.Fauzi Muhjiddin dan Ibu Nur'aini, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Pertiwi Teladan Metro yang diselesaikan pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan di SMP Yos Sudarso Metro yang diselesaikan pada tahun 2011, dan masuk SMA Kartikatama Metro yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada Tahun 2014, penulis diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Tes), dan pada tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pesisir Selatan. Selama menjadi mahasiswa penulis terdaftar menjadi anggota dalam UKMF Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) dan ROHIS.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirabbil'alamin

Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas kehendak dan nikmat rahmat yang telah diberikan-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orangtua tercinta, bapak Fauzi Muhjiddin dan ibu Nur'aini S.Pd.,sebagai tanda bakti dan terimakasih yang amat terdalam atas cinta kasih dan sayang, doa, dukungan, didikan, dan perjuangan untuk bisa menyekolahkan saya hingga tingkat sarjana.

Untuk kakakku, Fitriani Fauzi, Jemmy Andrio Fauzi, dan Ferdinan Fauzi, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Tidak lupa terimakasih untuk seluruh Dosen dan civitas FEB yang selalu memberikan layanan terbaiknya.

Serta tak lupa terima kasih kepada seluruh teman-teman yang ikut membantu dalam proses perkuliahan maupun skripsi.

Almamater tercinta, Universitas lampung

MOTTO

"Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh manusia, berani kepada orang tua, dan kesaksian palsu "–

Hadis Riwayat Bukhari

Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah." –

Ibnu Atha'illah As-Sakandari

Orang yang paling pemaaf adalah ia yang mau memaafkan meski bisa membalas dendam." –

Imam Husain

"Ketika kau bekerja keras dan gagal, penyesalan itu akan cepat berlalu. Berbeda dengan penyesalan ketika tidak berani mencoba." –

Akihiko Usami (Junjou Romantica)

"Sejujurnya, hanya ada sedikit arti di balik nama yang orang tuamu berikan. Apa yang lebih berarti adalah, yang orang tuamu lakukan di balik nama itu selama kehidupannya." –

Korosensei (Assassination Classroom)

"Lebih baik dibenci karena menjadi dirimu sendiri, daripada dicintai karena menjadi orang lain." –

Hachiman (Oregairu)

"Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui"

Aristotle Onassis

SANWACANA

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'aliakum Wr. Wb.

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kepada penulis. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pelatihan Staf Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Lampung Timur)" .Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa mencurahkan dan memberikan petunjuk dan karunia-Nya serta melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang sempurna, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu. Amin.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetapterlantun.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng Prayitna Harianto, M.S.selaku Rektor Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. , selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E.,M.Si.,Akt. ,selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt, sebagai Sekertaris Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Penguji dalam Skripsi ini. Saya sangat berterima kasih, atas do'a, dorongan motivasi semangat dan dorongan agar Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini..
7. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.selaku Dosen Pembimbing I yangselalu memberikan bimbingan, nasihat dan saran, serta inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.
8. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.selaku Dosen Pembimbing II yangselalu memberikan bimbingan, nasihat dan saran, serta inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.
9. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.S., S.E,.M.Si,.AK,.CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepadapenulis.
11. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terutama Mas Andri dan Mas Ferry yang telah membantu kelancaran studi penulis selamaini.
12. Bapak tercinta Fauzi Muhjiddin dan Ibu tercinta Nur'aini, S.Pd yang telah mengasuh dan mendidikku dengan sepenuh rasa kasih sayangnya. Beliau mendoakan, memberi dukungan dan harapan, serta mengajarkanku tentang arti hidup yang sebenarnya dan yang memperlihatkan ku betapa luasnya cakrawala dunia dan selalu mendukungku baik secara moril maupun materiil.
13. Keluarga besar Dr. Sowiyah, S.Pd, M.Pd untuk segala bentuk semangat, doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah selalu memberikan ridho- Nya kepadakita.
14. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Akuntansi (Himakta) yang telah mengisi dunia perkuliahan saya.

15. Teman-teman Rohis FEB UNILA yang telah mengisi dunia perkuliahansaya.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan Cahya, Andi, Rangga, Micho, Tika, Renaldo dan lainnya. Semoga di waktu yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengan keadaan yang lebih baik.
17. Keluarga Kos "Maduroso Kampung Baru" untuk semua kebersamaan dan kekompakannya.
18. Teman-teman KKN yang ke Pesisir Selatan. Terimakasih atas pertemuan, pelajaran, pengalaman dankebersamaaannya.
19. PemerintahKabupatenLampung Timur yang telah membantu jalannya proses penelitian ini.
20. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka atas semua keikhlasan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran ke arah perbaikan sangat diperlukan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 17Juni 2021
Penulis

Fran Oktara Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN JUDUL ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **vii**
SANWACANA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Perumusan Masalah 10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
1.3.1 Tujuan Penelitian 10
1.3.2 Manfaat Penelitian 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Dasar Teori 13
2.1.1Teori Kegunaan Informasi 13
2.1.2 Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*) 15
2.1.3 Teori Regulasi 16
2.1.3.1 Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik) 16
2.1.3.2 Interest Group Theory (Teori Kepentingan Kelompok 17
2.1.4 Laporan Keuangan 18
2.1.5 Sumber Daya Manusia 22
2.1.6 Sistem Pengendalian Intern 24
2.1.7 Pelatihan Staf 27
2.1.8 Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan 28
2.2 Penelitian Terdahulu 30
2.3 Kerangka Pemikiran 32
2.4 Pengembangan Hipotesis 33
2.4.1 Sumber Daya Manusia 33
2.4.2 Sistem Pengendalian Intern 35
2.4.3 Pelatihan Staf 36
2.4.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian 39
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 39
3.3 Jenis dan Sumber Data 40

3.4 Rancangan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 40
3.5 Definisi Operasional Variabel 41
3.5.1 Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) 41
3.5.2 Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern (X2) 42
3.5.3 Variabel Independen: Pelatihan Staf (X3) 43
3.5.4 Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X4) 43
3.5.5 Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan (Y) 43
3.6 Metode Analisis 48
3.6.1 Uji Instrumen 48
3.6.1.1 Uji Validitas 48
3.6.1.2 Uji Reliabilitas 49
3.6.2 Teknik Analisis Data dan Hipotesis 50
3.6.2.1 Uji t 51
3.6.2.2 Uji F 52
3.6.2.3 Koefisien Determinasi (R^2) 53
3.6.2.4 Variabel Dominan 53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 54
4.2 Penyajian Data 57
4.2.1 Data Karakteristik Responden 57
4.2.1.1 Karakteristik responden berdasarkan umur 57
4.2.1.2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 58
4.2.1.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 58
4.2.1.4 Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan 59
4.2.1.5 Karakteristik responden berdasarkan jumlah tanggungan 59
4.2.2 Tabulasi Data 60
4.3 Hasil Uji dan Analisis Data 60
4.3.1 Uji Instrumen Data 60
4.3.1.1 Uji Validitas 60
4.3.1.2 Uji Reliabilitas 65
4.3.2 Uji Hipotesis 68
4.3.2.1 Uji Regresi Linier Berganda 68
4.3.2.2 Uji Hipotesis 1 dan Uji t 70
4.3.2.3 Uji Hipotesis 2 dan Uji t 71
4.3.2.4 Uji Hipotesis 3 dan Uji t 72
4.3.2.5 Uji Hipotesis 4 dan Uji t 72
4.3.2.6 Uji Hipotesis 5 (Uji F) 73
4.3.2.7 Uji Koefisien Determinasi 74
4.3.2.8 Uji Variabel Dominan 75
4.4 Pembahasan 76
4.4.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pelatihan Staff, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, serta Kondisi Kualitas Laporan Keuangan di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 76

4.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas LaporanKeuangan di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 77
4.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangandi Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 79
4.4.4 Pengaruh Pelatihan Staf Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 80
4.4.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten LampungTimur 82
4.4.6 Pengaruh Variabel Dominan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 84

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 85

5.1 Kesimpulan 85
5.2 Saran 85
5.3 Implikasi 86

DAFTAR PUSTAKA 87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan peneliti terdahulu..... 30
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel..... 44
Tabel 3.2Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert..... 48
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur..... 57
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 58
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 58
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 59
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan 59
Tabel 4.6 Hasil Uji Instrumen Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 61
Tabel 4.7 Hasil Uji Instrumen Variabel Sistem Pengendalian Intern 62
Tabel 4.8 Hasil Uji Instrumen Variabel Pelatihan Staf..... 62
Tabel 4.9 Hasil Uji Instrumen Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah..... 64
Tabel 4.10 Hasil Uji Instrumen Variabel Kualitas Laporan Keuangan 65
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas..... 66
Tabel 4.12 Rentang Skala 67
Tabel 4.13 Hasil Analisis Rentang Skala..... 67
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... 69
Tabel 4.15 Hasil Uji F..... 74
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi 74
Tabel 4.17 Hasil Uji Variabel Dominan 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1Bagan Alir Kerangka Teoritis 33

DAFTAR LAMPIRAN

i. Kuesioner Penelitian 92
ii. Hasil Kuesioner 80 Responden 99
iii. Uji Validitas 101
iv. Uji Reliabilitas 105
v. Uji Regresi Linier Berganda 107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah menimbulkan perubahan sifatpemerintahan, dimana awalnya pemerintahan bersifat sentralisasi, kemudianberalih menjadi desentralisasi.Pemerintah Daerah dituntut untuk lebihmemberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asaspelayanan publik yang didalamnya meliputi: transparansi, akuntabilitas,partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban(Suryani, 2016).Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, makadilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari prosesperencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintahdalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehinggadapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentukpenetapan anggaran menurut Arifindalam Fernando Rico, 2013.

Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah tidak lepas dari campur tangan atas kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.Pejabat yang menyajikan laporan keuangan diwajibkan memberi pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan

Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Darise, 2008: 2).

Pengelolaan keuangan telah diatur pemerintah dengan melakukan reformasi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) namun di perbaharui pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang sebelumnya berbasis kas dan di wacanakan diterapkan tahun paling lambat 2015 namun nyatanya telah dilaksanakan 2013. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam rangka melaksanakan ketentuannya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah menetapkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas serta tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi baik kas maupun non kas, serta mencatat aset dan kewajiban.

Definisi menurut catatan BPK-RI (2018) dimana tercatat beberapa istilah:

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Keuangan Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (dalam Andiansyah, 2016), yakni:

1. Relevan

   Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*). Agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (*timeliness*).

2. Andal

   Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

   2.1 Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*)

   Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhiryang sama.

   2.2 Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

2.3 Penyajian secara wajar/ jujur (*representationalfaithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkanoleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

4. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.Apabila informasi yang terdapat di dalam LKPD memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Santoso, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah mengeluarkan PeraturanPemerintah No.

24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalammenyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan pentingreformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dantransparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dalam Mulia, 2019).

Kemudian Mulya (2019) mengatakan bahwa Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerahselama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harusmengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.24Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountabledan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitaslaporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhanterhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungansistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternalyang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harusdilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan danakuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapatmengakses informasi tentang hasilyang dicapai dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Menurut Bastian (2010: 137), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip–prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan

kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Demikian menurut Nordiawan (2006:25) menyatakan bahwa SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Penelitian terdahulu mengenai kualitas atas informasi laporan keuangan dibarengi pengaruh dari beberapa faktor memiliki dampak signifikan maupun tidak serta memiliki peran negatif dan positif yang terangkum dalam penelitian ini antara lain:

- PenelitianNugraheni dan Subaweh (2011) bahwa penerapan **Standar AkuntansiPemerintahan** berpengaruh sangat lemah terhadap kualitas laporan keuangan yangdibuat oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, yang menunjukkan bahwa rendahnya peran penerapan SAP dalam peningkatan kualitaslaporan keuangan.
- Penelitian Pujanira dan Taman (2017) meneliti Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. Hasil penelitianmenyatakan bahwa **kompetensi sumber daya manusia**berpengaruh positifterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara signifikan.
- Penelitian Mukhlisul Muzahid (2014) menyatakan bahwa Tingkat pendidikan, **kualitas pelatihan**, dan lama pengalaman pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Secara

parsial tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

- Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Lasoma (2013) yangmenunjukkan bahwa **standar akuntansi pemerintah** berpengaruh signifikanterhadap kualitas laporan keuangan dengan arah positif pada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Standarakuntansi pemerintah akan turut meningkatkan kualitas laporan keuangan padaDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten GorontaloUtara.
- Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan di Indonesia dilakukan oleh Sukmaningrum (2012),hasil penelitiannya menunjukkan faktor- faktor kontigensi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangandimanafaktor **sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, kualitas teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah** menjadi faktor penentu untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Faktor ini memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa kualitas dari laporan keuangan sering disertai dengan sejumlah masalah (**masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan**) yang menghambat tingkat kualitas laporan keuangan (Christiaens dalam Sukmaningrum, 2012).

Penelitian dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah, diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan teori dan fenomena fakta lapangan secara luasyang telah diuraikan sebelumnya dapatdilihat adanya kontradiksi atau perbedaan antara teori dengan hasil-hasildari penelitian terdahulu, oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini diberi judul “ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PELATIHAN STAF DAN PENERAPAN STANDARAKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SKPD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai kualitas laporan keuangan padapemerintah ini perlu dilakukan karena belum menyediakan bukti yang cukupmeyakinkan mengenai keberhasilan para SKPD menyajikan laporan keuangandengan menggunakan peraturan yang baru dalam meningkatkan akuntabilitassektor publik (Cohen; Carlin dan Guthrie dalam Andiansyah, 2016).Peningkatan kinerjasektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPDsebagai pengguna anggaran

(badan/dinas/biro/kantor) akan menghasilkan tingkatkinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yangmereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaranmaka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pelatihan staf, penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuanganpada pemerintah Kabupaten Lampung Timur yaitu,

1. Apakah variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan?
2. Apakah variabel sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan?
3. Apakah variabel pelatihan staf berpengaruh pada kualitas laporan keuangan?
4. Apakah variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan?
5. Apa variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini guna:

a. Mengetahui pengaruh variabelkompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan.
b. Mengetahui pengaruh variabel sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan.
c. Mengetahui pengaruh variabelpelatihan staf dengan kualitas laporan keuangan.
d. Mengetahui pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.
e. Mengetahui variabel dominan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
b. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
c. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh pelatihan staf terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
d. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur.

e. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh ke-empat variabel dalam menemukan aspek/faktor dominan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kegunaan penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitianini antara lain:

a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
b. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh SDM, SPI, pelatihan staf dan SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitan selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kulaitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Dasar Teori

2.1.1 Teori Kegunaan Informasi

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decisionusefulness*) adalah Chambers. Dalam Belkoui (2001) dan dikutip dalam Sukmaningrum (2012)Ia mengatakan sebagai berikut:

> "Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan… Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan."

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Staubus (2003) dalam Kiswara (2011) menyatakan pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors*.

Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. FAF membuat GASB pada tahun 1984 dalam hubungan "kakak-adik" dengan

FASB. GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit (Freeman, 2008).

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No. 2 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan.

Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai

dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-backvalue*), dan nilai prediktif (*predictive-value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representationalfaithfullness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

2.1.2 Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi di mana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempertanggung jawabkan pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi sangat dibutuhkan. Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri dan sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan(Suranyi-Unger, 1952). Menurut Golberg (1965) dalam Sari (2013) mengemukakan bahwa manajemen (*agent*) sebagai *steward* akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, dalam hal ini dapat diartikan Pemda dengan rakyat.

Stewardship Theory beranggapan bahwa kepentingan rakyat dapat dimaksimalkandengan membagi (*shared*) wewenang, hak dan kewajiban di antara

peranan pengawas/pemeriksa dan manajemen, sehingga dalam *Stewardship Theory* menyatakan bahwa para eksekutif cenderung akan semakin termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri (Hunger dan Wheelen,2004).Dengan demikian jika pihak *principal* dan *agent* memilih hubungan kepengurusan (*stewardship*), hasilnya adalah hubungan yang benarbenar penting yang dirancang untuk memaksimalkan potensi kerja kelompok, demikian pula halnya pihak *principal* memilih untuk menciptakan suatu situasi kepengurusan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pelimpahan wewenang yang cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik (Donaldson dan Davis, 1991).

2.1.3 Teori Regulasi

Teori ini dikemukakan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi sang permintaan atau demand dan legislatif sebagai supply.Terdapatdua teori dalam teori regulasi menurut Scott (2009) yaitu:

2.1.3.1 Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik)

Teori yang mempunyai pandangan bahwa regulasi haruslah dapat memaksimumkan kesejahteraan sosial karena regulasi merupakan hasil dari permintaan publik atas koreksi kegagalan pasar, regulator berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan publik.Walau pandangan tersebut merupakan pandangan yang ideal, namun dalam implementasinya masih mengalami beberapa masalah. Permasalahan yang timbul dalam Public Interent Theory adalah kesulitan dalam menentukan berapa jumlah regulasi yang harus dibuat dan apakah

regulasi tersebut akan mampu memuat semua pihak. Terdapat permasalahan yang serius yang terletak pada motivasi dati badan regulator. Adanya tugas yang kompleks, sulit bagi badan legislatif untuk mengawasi para regulator.

Kemampuan badan legislatif untuk mendorong regulator bekerja untuk kepentingan publik menjadi lemah karena hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga seringkali regulator akhirnya bekerja demi kepentingannya sendiri daripada kepentingan publik.

2.1.3.2 Interest Group Theory (Teori Kepentingan Kelompok)

Teori ini memberikan pandangan bahwa sebuah industri beroperasi dalam kepentingan kelompok. Teori kepentingan kelompok daripada regulasi meninjau bahwa suatu industri beroperasi mewakili sejumlah kelompok kepentingan atau konstituen. Pertimbangan beberapa industri manufaktur sebagai contoh.

Perusahan-perusahaan di dalam suatu industri membentuk suatu kelompok kepentingan tertentu, seperti yang dilakukan pelanggannya. Kelompok kepentingan lainnya menjadi pengamat lingkungan, yang tugasnya berkonsentrasi dalam bidang tertentu yaitu pertanggangjawaban sosial industri.

Berbagai kelompok kepentingan akan melobi ke legislatif untuk bermacam jumlah dan jenis regulasi. Sebagai contoh; industri dengan sendirinya meminta regulasi untuk melindungi persaingan harga yang dihadapi atau menghadapi pelanggan pada operasinya dengan industri-industri yang berhubungan. Pelanggan mungkin akan membentuk kelompok-kelompok untuk melobi standar kualitas atau pengendalian harga.

Hubungan teori ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah pemerintah sebagai pembuat regulasi (regulator) menginginkan informasi dalam laporan

keuangan yang dibuat oleh satuan kerja di setiap daerah berhasil menyampaikan informasi keuangan yang berkualitas untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan dimasa yang akan datang demi kepentingan publik (Stigler, 1971).

2.1.4 Laporan keuangan

Laporan Keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas laporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untukpengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas laporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas laporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas laporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas laporan dalam hal: aset;kewajiban; ekuitas dana; pendapatan; belanja; transfer; pembiayaan; dan arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran

yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas laporan selama satu periode.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

   Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

   Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

3.1 Penyajian Secara Jujur (*representational faithfulness*)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

3.2 Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3.3 Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas laporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5 Sumber Daya Manusia

Kinerja sumber daya manuisa adalah kemampuan seseorang atau Individu,suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan

fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien(Winidyaningrum dalam Darmawan 2018). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat darikemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumberdaya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, makadari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upayamencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum 2012).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Darmawan, 2008).

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. Hutapea dalam Darmawan (2018) menyatakan bahwa ada tiga kompnen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh masingmasing individu.

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge)* adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan

2. Keterampilan

   Ketrampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya ketrampilan dalam memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

3. Sikap

   Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi.

2.1.6 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien,

pelaporan keuangan yang disajikan secara andal, pengamanan terhadap aset negara serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah:

> *"Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*
> *1.Effectiveness and efficiency of operations*
> *2. Reliability of financial reporting*
> *3. Compliance with applicable laws and regulations."*

Tujuan yang pertama adalah menekankan pada tujuan dasar dalam setiap organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya. Kedua adalah menyangkut kehandalan laporan organisasi. Terakhir adalah berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada.

Sistem pengendalian intern bukan hal baru dalam pemerintahan. Petrovits et al. (2011) menyatakan:

> *"Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations"*

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui keggiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pemgamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.Kegiatanpengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum

   Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisaan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian aplikasi

   Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2005) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan/ pemantauan.

Terdapat hubungan langsung antara tujuan, yang merupakan hal yang diperjuangkan untuk dicapai organisasi dan komponen-komponen tersebut yang mencerminkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Control environment (lingkungan pengendalian), menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi

komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.

Risk assessment (penilaian risiko), merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Control activities (aktivitas pengendalian), mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajamen secara efektif.

Information and communication (informasi dan komunikasi), sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional.

Monitoring (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan).

2.1.7 Pelatihan Staf

Pelatihan (*training*) adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu (Stamatiadis et al, 2009). Pelatihan kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal I ayat 9 adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Menurut Irianto (2009), pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, skill, dan sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan.Pelatihan bagi pegawai merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (*current job oriented*). Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini (Irianto, 2009). Dimensi dalam variabel pelatihan staf diantaranya dimensi kemampunan dimana yang menjadi indikatornya adalah pelatihan staf itu sendiri yang memadai serta konsisten dan dimensi pengetahuan yang mana indikatornya adalah kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaanya (Kusuma, 2013).

2.1.8 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan,

efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP yang kemudian akan digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dan diterapkan selambat-lambatnya tahun 2015. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Standar akuntansi pemerintahan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu:

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No. 02 Laporan Realiasasi Anggaran
3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP No 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP No 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No 08 Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP No 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No 10 Koreksi Kesalahan

11. PSAP No 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

12. PSAP No 12 Laporan Operasional

Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO)¸ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang telah dilakukan sebelunya oleh peneliti untuk memperkuat Analisa data penelitian.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan peneliti terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Donny Andiansyah (2016)	Skripsi: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhikualitas pelaporan keuangan(Studi Kasus Pada Satuan Kerja PerangkatDaerah di Kota Bandar Lampung)	Sumber daya manusia, Pelatihan staf keuangan, Kualitas teknologi informasi, dan Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan
2	Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti (2018)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	Penerapan SAPdan kompetensi SDMberpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemprov Banten. Membuktikan bahwa semakin baik tingkat penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Begitu pula pada kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, seperti tingkat pengetahuan, keterampilan dan

			sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.
3	Nurillah dan Muid (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel SPI yang bernilai 0,289 dengan tingkat signifikansi 0,030. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan SPI, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Sari, Adiputra dan Sujana (2014)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)	Hasil pengujian terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana
5	Mukhlisul Muzahid (2014)	Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Aceh Utara	Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Secara parsial tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
6	Kadek Desiana W, Nyoman Trisna H, Ni Kadek S (2014)	Pengaruh kompetensi sdm, penerapan sap, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

7	Ida Ayu Enny K dan Ni Made Adi E (2016)	Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8	Oka Reza Aditya dan Welly Surjono (2017)	Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan kuat/signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai r=0,603 dan Kd=36,36%.
9	Jhon F Wungow, Linda Lambey, Winston Pontoh (2016)	Pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan dan jabatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mempunyai tingkat Pendidikan dan masa kerjatidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun pelatihan dan jabatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pelatihan staf dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

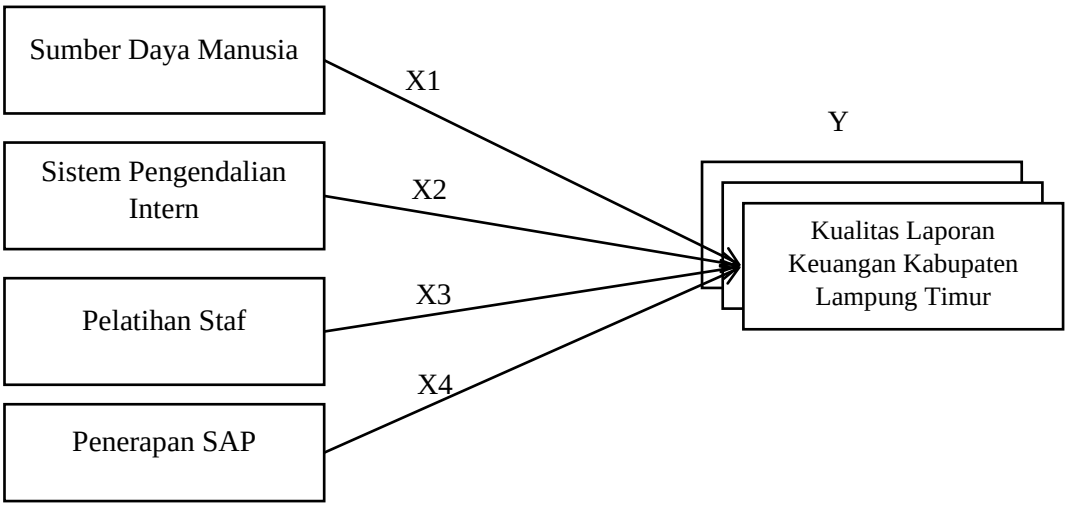

Gambar 2.1 Bagan Alir Kerangka Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kajian pustaka diatas, dikembangkan hipotesis berdasarkan faktor-faktor pada satuan kerja yang diduga memliki pengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual di instansi pemerintah tingkat satuan kerja, yang dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1 Sumber Daya Manusia

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Organisasi yang dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Sugeng dan Imamdalam Nurillah dan Muid, 2014).

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Menurut Nazier (2009)

sebesar 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, juga ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yangmemiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi (Zetra, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) membuktikan dalam penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah DIY.Kompetensi Sumber Daya Manusiamerupakan kemampuan yang dimilikiseorang pegawai yang berhubungan denganpengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapatmencapai tujuan yang diinginkan. Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensiakan dapat menyelesaikan pekerjaanyasecara efisien dan efektif. Adanyakompetensi sumber daya manusia makaakan mendukung ketepatan waktupembuatan laporan keuangan. Kemudian penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur

2.4.2 Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

Sistem pengendalin intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

Menurut Mulia (2019), Semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah maka semakin baik pula kualitaslaporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan denganpenelitian Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa system pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitaslaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, Yudianta &Erawati(2012) dengan hasil penelitiannya bahwa pengendalian intern akuntansiberpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi.Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur

2.4.3 Pelatihan Staf

Menurut Muzahid (2014) Pada hakekatnya kegiatan pelatihan atau training perlu dilaksanakan olehsuatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan meningkatkan keterampilan danpengetahuan karyawan. Pelatihan dalam hal ini adalah proses pendidikan yang di dalamnya adaproses pembelajaran dilaksanakan dalam jangka pendek, bertujuan untukmeningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga mampumeningkatkan kompetensi individu untuk menghadapi pekerjaan di dalam organisasisehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian dapat simpulkanbahwa “pelatihan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dankinerja mendatang”.

Nitisetimo dalam Wungow (2016) menyatakan bahwa pemberian pelatihan ditujukan agar para karyawandapat menguasai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga terwujudlah efisiensi danefektifitas dalam pelaksanaan tugasnya,sedangkan Hariandja menjelaskan pelatihanlebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saatini. Terdapat beberapa alasan mengapa pelatihan harus dilakukan atau menjadi bagian yang sangatpenting dari kegiatan manajemen sumber daya manusia, diantaranya: pegawai yang belummemahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, adanya perubahan lingkungan kerja dantenaga kerja, meningkatnya daya saing dan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pelatihan Staf berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur

2.4.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bastian (2010: 137) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

> "Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan keuangan pemerintah di Indonesia".

Mengacu pada SAP, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP.

Untuk mendukung pernyataan di atas, hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu sebelum diterapkannya SAP maka laporan keuangan Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 belum dapat memecahkan permasalahan pencatatan keuangan dan belum ada cara untuk menyelesaikannya. Namun, setelah diterapkan SAP maka laporan keuangan tahun berikutnya telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami).

Berdasarkan pemaparan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang mana telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual. Meskipun pencatatan pada LKPD sudah berbasis akrual, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Timur khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menyajikan komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai yang termuat dalam SAP Berbasis Akrual yaitu belum disajikannya Laporan Operasional dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas hingga tahun anggaran 2018.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di wilayah kerja daerah Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Timur memperoleh opini audit yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di tahun 2019 setelah menanti selama 20 tahun (lahirnya 1999)dan mendapatkannya kembali pada tahun 2020.

Teknik penarikan sampel yang di gunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Instansi yang sudah menerapkan SAP yang baru yakni akrual basis,

2. SKPD yang memiliki struktur jabatan kepegawaian jelas.

3. Pegawai yang berhubungan dan/atau dapat menyusunlaporan keuangan yaitu di bagian Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi Laporan.

Pemilihan bagian tersebut karena bagian tersebut yang bertanggung jawab dan yang mengerti akan pengelolaan laporan keuangan di dalam organisasi mereka, sehingga jawaban kuesioner dapat diandalkan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari survei responden berupa kuesioner (Indriantoro, 2013).

3.4 Rancangan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan desainpenelitian kuantitatif untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pelatihan staf danpenerapan SAP sebagai variabel independen berpengaruh terhadapKualitas Pelaporan Keuangan pada pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara

mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner.

Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Indriantoro, 2013).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan pengukurannya. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independent. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Sugiyono, 2013).Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem pengendalian intern (X2), pelatihan staf (X3), dan penerapan SAP (X4). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2013).Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lampung Timur (Y1).Variabel ini diukur menggunakan instrument kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5, dimana responden diminta menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya dari setiap pertanyaan yang diajukan.

Penjelasan variabel sebagai berikut:

3.5.1 Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut Sukmaningrum (2012) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

3.5.2 Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern (X2)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011)

Variabel sistem pengendalian intern ini dapat diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, et al. (2003) dan dikembangkan oleh Choirunisah (2008). Terdapat empat indikator, yaitu: (1) Integritas data, (2) Ketepatan input dan posting data, (3) Prosedur otorisasi dokumen transaksi, (4) Tersimpannya dokumen sumber data, (5) Pembagian tanggungjawab, (6) Penentuan kebijakan dan standar akuntansi, (7) Implementasi kebijakan dan standar dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (5) ”SangatSetuju” untuk skenarionya dan jika responden menjawab (5) ”Sangat Setuju”, maka cenderung bahwa kualitas laporan keuangan tinggi.

3.5.3 Variabel Independen: Pelatihan Staf (X3)

Pelatihan staf terkhusus bagian keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tersedianya pelatihan memadai yang diselenggarakan, baik oleh satuan kerja yang bersangkutan, instansi vertikalnya, ataupun instansi lain yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan pemerintah dari satuan kerja yang bersangkutan.Pelatihan dilakukan agar para pekerja menguasai tata cara pelaporan yang menjadi tanggung jawabnya dan memberi *output* yang efisiensi danefektifitas dalam pelaksanaan tugasnya. Mengapa pelatihan harus dilakukan atau menjadi bagian yang sangatpenting diantaranya: pekerja/pegawai yang belummemahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, adanya perubahan lingkungan kerja dantenaga kerja, meningkatnya daya saing dan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang ada.

3.5.4 Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X4)

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (Tanjung, 2012 dalam Lasoma, 2013).

3.5.5 Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan (Y)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.Ke-empat karakteristik kualitatif tersebut adalah relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dimana respoden diminta pendapatnya dari setiap pertanyaan mulai dari tidak setuju sampai sangat setuju. Untuk lebih jelasnya definisi operasional variabel, dimensi serta penyebaran indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Sumber Daya Manusia (X1) Sukmaningrum (2012)	SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent yang berkualitas tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).	1.Tanggung Jawab	1.Peran dan fungsi dari pekerjaan	1
			2.Tugas dari pekerjaan	2
			3.Pedoman pekerjaan	3
		2.Kemampuan	1.Kemampuan dibidang akuntansi	4
			2.Pemahaman pekerjaan	5
			3. Kemampuan yang sesuai sebagai pengelola keuangan	6
		3. Pengalaman	1.Pengalaman dibidang akuntansi	7
			2.Pengalam dalam pengelolaan keuangan	8
Sistem Pengendalia	Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu	(1)Integritas data,		1

n Intern (X2)	proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011)	(2)Ketepatan input dan Posting data, (3)Prosedur otorisasi dokumen transaksi, (4)Tersimpanny a dokumen sumber data (5)Pembagian tanggung jawab		2 3 4 5
Pelatihan staf (X3) Kesuma (2013)	Pelatihan (training) adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu (Stamatiadis dalam Andiansyah, 2016).	1.Kemampuan 2.Pengetahuan	1. Pelatihan itu sendiri 2. Pelatihan bagi karyawan baru 3. Pelatihan dapat meningkatkan rasa ingin tahu 4. Pelatihan dapat meningkatkan volume pekerjaan 5. Pemberian pelatihan yang konsisten 6. Pelatihan untuk Mencari Solusi 7. Pengembangan bakat 1. Peningkatan Komunikasi	1 2 3 4 5 6 7 8
Penerapan Standar akuntansi pemerintah	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan	1. PSAP NO 1 Penyajian Laporan Keuangan	1. Basis Akrual 2. Komponen Laporan Keuangan\	1 2

(X4) Nugraheni dan Subaweh (2011) dan PP No 71 tahun 2010	menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD, (Nugraheni dan Subaweh,2011)	2. PSAP NO.2 Laporan Realisasi Anggaran	1. Penyajian laporan realisasi anggaran	3
			2. Anggaran berbasis kas	4
		3. PSAP NO.3 Laporan Arus Kas	1. Penyajian Laporan Arus Kas	5
		4. PSAP NO.4 Catatan atas laporan keuangan	1. CaLK disusun secara sistematis	6
		5. PSAP NO.5 Akuntansi Persediaan	1. Pengakuan persediaan	7
			2. Pengukuran Persediaan	8
		6. PSAP NO.6 Akuntansi Investasi	1. Perlakuan Investasi	9
		7. PSAP NO.7 Akuntansi Aset Tetap	1. Pengakuan aset tetap	10
			2. Pengukuran aset tetap	11
		8. PSAP NO.8 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan	1. Pengakuan kontruksi dalam pengerjaan	12
		9. PSAP NO.9 Akuntansi Kewajiban	1. Klasifikasi kewajiban	13
			2. Pengakuan kewajiban	14
			3. Pengukuran kewajiban	15
		10. PSAP NO. 10 Koreksi	1. Konsep koreksi kesalahan	16
			2. Konsep	17

		kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa 11. PSAP NO. 11Laporan Keuangan Konsolidasi an	perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa 1. Komponen Laporan Keuangan Konsolidasian	 18
Kualitas laporan keuangan (Y) Sukmaningrum (2012)	Laporan keuangan adalah catatan informasi tambahan atas laporan keuangan dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang 1. Relevan 2. Andal 1. *Preditive value* 2. Lengkap 3. Tepat waktu 1. Penyajian secara jujur 2. Bebas dari salah saji material 3. Netral	1. Relevan 2. Andal 3.Dapat Dibandingkan 4.Dapat Dipahami	1. Preditive value 2. Lengkap 3. Tepat waktu 1. Penyajian secara jujur 2. Bebas dari salah saji material 3. Netral 4. Dapat diverifikasi 1.Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan peride sebelumnya 1. Dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan	1 2 3 4 5 6 7 8 9

Berdasarkan tabel operasional tersebut, maka pengukuran dan ukuran skala yang digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan skala likert dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuesioner data angket dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju (CS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).Setiap pilihan akan diberikan skor/bobot nilai yang berbeda seperti tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert

No.	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (CS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linear Berganda. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas.

3.6.1 Uji Instrumen

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

$$r = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

Keterangan:

- r : koefisien korelasi antara variabel x dan y
- Σ x : jumlah skor x
- Σ y : jumlah skor y
- n : jumlah sampel
- Σ xy : jumlah perkalian antara variabel x dan y
- Σ x^2 : jumlah kuadrat skor x
- Σ y^2 : jumlah kuadrat skor y

Perhitungan uji validitas dari variabel X_1, X_2, X_3 dan Y tersebut, akan dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS. Adapun kriteria penilaian uji validitas, yaitu:

1) Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikasi 0,05), maka dapat dinyatakan item kuesioner tersebut valid.
2) Apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikasi 0,05), maka dapat dinyatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran one shot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60 Nunnally (Ghozali, 2013).

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)}\right]\left[1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2 t}\right]$$

Keterangan:

- r_{11} : koefisien reabilitas alpha
- k : jumlah item pertanyaan
- $\sum \sigma^2 b$: jumlah varian butir
- $\sigma^2 t$: varian total

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Apabila hasil koefisien Alpha > taraf siginifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut *reliable*.
2) Apabila hasil koefisien Alpha < taraf siginifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak *reliable*.

3.6.2 Teknik Analisis Data dan Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variable dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3 + \beta 4\ X4 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan (variabel terikat)

X1 = Kompetensi sumber daya manusia(variabel bebas)

X2 = Sistem pengendalian Intern(variabel bebas)

X3 = Pelatihan staf (variabel bebas)

X4 = Penarapan Standar Akuntansi Pemerintah(variabel bebas)

α = Konstanta

β = slope regresi atau koefisien regresi dari X_x

e = kesalahan residual /eror

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 22 dengan tingkat signifikansi 5% (a = 0,05) (Ghozali 2013).

3.6.2.1 Uji t

Uji t digunakan untuk dapat mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dengan memperhatikan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05

maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013). Apabila t hitung > t tabel, maka H0 (hipotesis negatif) ditolak dan H1 (hipotesis positif) diterima, begitupun sebaliknya. Berikut ini merupakan rumus uji t.

$$t = r\left\{\frac{n-2}{1-1^2}\right\}^{1}/_{2}$$

Keterangan:

r : Korelasi produk momen

n : Jumlah responden

t : Uji hipotesis

3.6.2.2 Uji F

Uji F digunakan untuk dapat mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan (bersama – sama) terhadap variabel terikat. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka dapat dinyatakan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013). Apabila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, begitupun sebaliknya. Berikut ini merupakan rumus uji F.

$$F = \frac{R^2/K}{(1-R^2)(n-K-1)}$$

Keterangan:

F : Harga F

R^2 : Keofisien korelasi berganda

K : Jumlah variabel bebas

N : Jumlah sampel

3.6.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat dapat ditunjukan dalam aplikasi SPSS, koefisien determinasi terletak pada *Model Summary* dan tertulis *R Square*. Jika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2013).

3.6.2.4 Uji Variabel Dominan

Dalam penelitian ini dihitung juga sumbangan efektif (SE) yang digunakan untuk menguji variabel bebas mana yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel terikat. Rumus untuk mencari sumbangan efektif adalah sebagai berikut.

$$SE = \beta \text{ x } \textit{pearson correlation} \text{ x } 100\%$$

Keterangan:

SE : Sumbangan efektif

β : Standar koefisien $Beta_x$

pearson correlation (r) : Koefisien korelasi

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian penelitian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawabrumusan masalah sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.
3. Pelatihan staf berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.
4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada kualitaslaporan keuangan
5. Variabel dominan pada penelitian yang sangat signifikan dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yaitu:

1. Penelitian selanjutnya jika ingin meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini,maka dianjurkan pada subjek yang laindengan variabel-variabel lain yangberpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan dan bisa mengambilstudi kasus pada wilayah kerja yang lebih luas.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas target responden penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif dan juga lebih menyesuaikan dengan PeraturanPemerintah yang berkaitan dengan akuntansi baik sistem akuntansi maupun standar akuntasi pemerintah.

5.3 IMPLIKASI

Hasil penelitian ini memberikan *statement*atau pernyataanbahwa kualitas laporan keuanganpemerintah daerah/kabupaten dipengaruhi kepada kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pelatihan staf,dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Kepengaruhan ke empat indikasi tersebut secara simultan berpengaruh besar.

Hasil inidiharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait denganpengelolaan dan laporan keuangan pemerintah daerah/kabupaten dengan mempertimbangkan danmeningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki mulai dari tanggungjawab, hingga etos kerja yang baik per individu, didukungdengan pelatihan staf, adanya pengendalian dari struktural atasan kerja, serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan serta adanya rancanganpengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola danpelaporan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugasdan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannyapelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, O. R.; Surjono, W. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Sikap*, *2*(2), 49–62.

Andiansyah, D. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.

Barus, S. (2017). *Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Dengan Sistem Pengendalian Internal* . Universitas Sumatera Utara.

Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga.

BPK-RI. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017*. *11*, 1–6.

Celviana, W.; Rahmawati, R. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi.*Simposium Nasional Akuntansi. XIII* Purwokerto, 6.

Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*.

Darmawan, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Dodopo, Y., Sondakh, J., T. J. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, dan Kualitas Pelatihan terhadap Keterandalan Laporan Keuangan pada SKPD

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.*Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*,8(1).

Herawati, T.; Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal STAR*, *14*(2), 10–45. https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145

Indriantoro, N. . B. S. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (BPFE (ed.); Pertama).

Insani, I. (n.d.). *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Daam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. www.docstoc.com.

Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, *16*(2), 1290–1318.

Kiswara, E. (2011). *Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda*.

Kusuma, M. I. Y. . F. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*, *2*(3), 1–14.

Lasoma, V. A. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kuangan dan Asset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo*.

Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, *5*(1), 22. https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500

Mardiasmo, Dr.; MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.

Mulia, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, *9*, 7–21.

Muzahid, M. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi*, *2*(2), 179–196. https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/2174

Nordiawan, D.; Hertianti, A. (2006). *Akuntansi sektor publik*.

Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *13*(1), 48–58. https://doi.org/10.35760/eb.2008.v13i1.321

Nurillah, A. S.; Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Penerapan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, *3*(2).

Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/180/permendagri-no-04-tahun-2008

Tentang Sistem Akutansi Pemerintahan.Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. www.menpan.go.id/rbkunwas/images/pedoman/pemgawasan_PeraturanPemerintah-tahun-2008-060-08.pdf.

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretaris Negara. www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentangstandar akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf.

Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *6*(2). https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, *20*(2), 8–17. http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097

Richo, F. (2013). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Motivasi, Pelimpahan Wewenang, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Study Empris Di Provinsi Lampung)*. Universitas Lampung.

Santoso, P. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung*. (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).

Sukmaningrum, T.; Harto, P. (2012). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *(Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*.

Suryani, D. (2016). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Budgetary Slack, Pelimpahan Wewenang Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Study Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung)*. Universitas Lampung.

Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *2*(1), 1–11.

Wungow, J. F., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan Dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"7*(2), 174–188. https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13560

Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada DPKAD Se-Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 1–24.

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/66

Yudianta, I. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *1*(1).

Zanaria, Y. (2016). Tinjauan Implementansi Akuntansi Berbasis Akrual Di Propinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi*, *12*(2).